

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan upaya yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan. Pembangunan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, dan berkelanjutan guna meningkatkan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan negara lain, untuk mewujudkan pembangunan nasional maka dalam pelaksanaannya harus adil dan merata diseluruh daerah di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya pembangunan nasional mutlak di perlukan agar terciptanya pembangunan yang benar-benar utuh.

Otonomi daerah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, yang diperbaharui dengan UU No. 32 tahun 2004 dan sekarang telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, dimana daerah diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing secara efektif dan efisien, guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki potensi sumberdaya yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah lainnya, sehingga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya memiliki PAD yang cenderung rendah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerah.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal 1, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah guna mensejahterakan masyarakatnya.

Dengan adanya desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Indikator dari penilaian kinerja ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga pemerintah harus mampu memahami karakteristik dari daerahnya agar belanja daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran bagi penerimaan pemerintah daerah. Dimana produk domestik regional bruto adalah sejumlah nilai tambah produksi yang ditimbulkan oleh berbagai sektor usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu daerah atau regional dalam satu kurun waktu tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan media utama bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumberdaya daerah secara optimal dan sebagai media untuk mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam hal pembiayaan pembangunan di daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Belanja Daerah (BD) merupakan kewenangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah. Belanja yang berhubungan dengan urusan wajib seperti peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pembangunan harus diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Dari sisi pendapatan, daerah amat tergantung pada sumber penerimaan dari transfer pusat. Sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Suara Merdeka.com, 2013). Hal ini disebabkan karena lemahnya perencanaan dan pengawasan keuangan dalam sektor publik.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi beberapa tahun terakhir telah mendorong daya beli masyarakat sehingga permintaan meningkat. Namun, karena produksi dalam negeri belum memadai, pemenuhan permintaan itu ditempuh melalui impor (Metrotvnews.com, 2013). Hal ini sangat disayangkan karena peningkatan permintaan tidak dibarengi dengan tersedianya barang. Padahal apabila produksi dalam negeri memadai, maka keuntungan yang didapat dari permintaan masyarakat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tercermin pada peningkatan PDRB.

Pelaksanaan otonomi daerah masih ada masalah yang sama. Utamanya terkait dengan belanja pegawai dan belanja rutin yang sangat besar. Akibatnya, ruang untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik menjadi kecil (Republika.co.id, 2013).

Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat (wikipedia.org, 2013).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fransisca Roosiana Kurniawati (2010), memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia. Askam Tuasikal (2008) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Askam Tuasikal (2008) yaitu dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Modal (BM) pemerintah daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia yang mengambil sampel dalam kurun waktu 5-10 tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan ujian sidang Program Studi S1 Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas.

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.
3. Mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara simultan terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi, khususnya dalam mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Belanja Daerah (BD) di Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi bagi pihak lain untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Operasional

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu Akuntansi Sektor Publik (ASP).
2. Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat dalam hal menyusun kebijakan dimasa yang akan datang.
3. Bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wacana dalam perkembangan ilmu Akuntansi Sektor Publik (ASP).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dengan waktu penelitian di tahun 2013 dan menggunakan acuan periode tahun 2005-2013.